



KATA PENGANTAR

Setelah rampungnya penyusunan RENSTRA Badan KB dan PP di Tahun 2016, ternyata terjadi perubahan Nomenklatur pada Badan KB dan PP di akhir tahun 2016 dimana awalnya merupakan SKPD gabungan antara Badan Keluarga Berencana dengan Pemberdayaan Perempuan kemudian menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang hanya mengurus masalah Kependudukan dan keluarga berencana saja, sedangkan Pemberdayaan Perempuan melepaskan diri dan bergabung dengan PMK.

Meskipun demikian, kami selalu ingat untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya maka penyusunan Revisi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat diselesaikan.

Yang merupakan dasar pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Binjai .

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana penyusunan Revisi Renstra ini harus tetap berpedoman pada RPJMD Kota Binjai 2016-2021 merupakan arah dan pedoman bagi Dinas Pemngendalian Penduduk dan KB Kota Binjai untuk menyelenggarakan program/kegiatannya selama 5 (lima) tahun kedepan, meskipun untuk hal ini telah dimulai dari tahun 2016 lalu dan dilanjutkan dengan revisi di tahun 2017 sampai nanti tahun 2021.

Kami tim penyusun Revisi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan Revisi RENSTRA ini. Kami berharap agar semua Program/kegiatan yang telah kami rencanakan dalam RENSTRA ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil yang maksimal



2016-2021

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2016-2021 ini telah melalui beberapa penyesuaian dan beberapa langkah penyempurnaan antara lain dalam sasaran, outcome/output, kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), komponen dan sub komponen dengan melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai. Selanjutnya dalam implementasinya melalui Renja dan RKA kedepannya diharapkan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dapat mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2016-2021 hasil revisi ini.

Disadari bahwa penyusunan Revisi ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang Rencana Strategik dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai untuk 5 (lima) tahun kedepan secara jelas dan menyeluruh.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, amin.

Binjai, Februari 2019

KA. DINAS PPKB KOTA BINJAI



Drg. LILIK ROSDEWATI, SH, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 19630725 200502 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	1
1.4 Sistematika	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPKB	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPPKB	12
2.2 Sumber Daya DPPKB	12
2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB	17
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Binjai	18
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra BKKBN Provinsi SUMUT.....	19
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	20
3.5 Penentuan Isi-isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB	30
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPPKB dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VII PENUTUP	45
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019	



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat kembali urutan dari pemilihan Kepala Daerah untuk Kota Binjai pada tanggal 09 Desember 2015 lalu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Awal Renstra (Rencana Strategik) Perangkat Daerah (PD). Lalu kemudian ada Revisi terhadap RPJMD di tahun 2017 sehingga Renstra PD pun di revisi juga, dan ketika terjadi lagi perubahan pada RKPD di tahun 2018 maka di Revisi lagi RPJMD tersebut yang diikuti dengan Revisi Renstra PD.

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Walikota) yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD ini kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA PD yang akan menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Program Prioritas Daerah selama 5 Tahun kedepan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB telah mengalami 3 kali Revisi. Pertama masih dalam bentuk Rancangan awal yang masih disebut Renstra Badan KB dan PP Kota Binjai Tahun 2016-2021 dibuat di Tahun 2016, pada Tahun 2017 direvisi karena adanya perubahan nomenklatur yaitu perubahan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang mana Keluarga Berencana berdiri sendiri dan terlepas dari Pemberdayaan Perempuan, sehingga terjadi pula beberapa perubahan menyangkut hal tersebut. Lalu kemudian karena adanya Perubahan RKPD Kota Binjai dan merubah RPJMD juga sehingga Renstra DPPKB harus di revisi kembali.

Jadi RENSTRA hasil revisi Tahun 2018 inilah yang kedepannya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan semua program dan kegiatan hingga tahun 2021. .

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA SKPD antara lain adalah:



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
12. Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini antara lain adalah :



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Prgram KKBPK;
2. Memberikan informasi pada pemerintah daerah tentang Rencana Program dan Rencana Kerja DPPKB selama 5 (lima) tahun kedepan;
3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan serta Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD terkait lainnya, terutama dengan Bappeda dan BPKAD;
4. Menjadi Kerangka Dasar dalam rangka peningkatan kualitas Kinerja Pelayanan DPPKB yang disesuaikan dengan target pembangunan Daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan program KKBPK;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan Penyusunan dan sistematika penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Bab ini berisi tentang tugas ,fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKB, Sumber daya OPD , Kinerja Pelayanan OPD dan tantangan dan peluang pengembangan Perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Bab ini berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra BKKBN Pusatdan / BKKBN Provinsi serta teraksir penentuan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

Pada bab ini dibahas mengenai Tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB serta Hubungan tujuan dan sasaran DPPKB dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Strategi dan arah kebijakan/pedoman DPPKB untuk mencapai tujuan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab VI ini membahas mengenai Program RPJMD yang sesuai dengan dengan tugas dan fungsi DPPKB beserta indikator kinerja program dan Pagu yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan untuk setiap program tersebut.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini membahas tentang Indikator Kinerja yang direncanakan akan dicapai DPPKB dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan, sasaran serta program dan kegiatan

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup atau akhir dari susunan Rancangan strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dimana didalamnya berisikan simpulan dan saran atas RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKB

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PPKB



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai di atur bahwa : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (dulu benama Badan KB dan PP) mempunyai tugas mendukung program Kepala Daerah Terpilih (Walikota) Binjai dalam hal mengatur masalah pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 orang Kabid (Kepala Bidang). Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian) dan Kabid membawahi masing-masing 3 (tiga) orang Kasi (Kepala Seksi).

Selain itu ditiap kecamatan di tugaskan pula seorang Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (Ka.UPTD) yang membawahi beberapa orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) guna membantu melaksanakan program Keluarga Berencana.

Dinas PP dan KB Kota Binjai mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (**Good Governance**). Dan selama 5 (lima) tahun belakangan ini kinerja Dinas PP dan KB dinilai sangat memuaskan, baik itu dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam hal pemenuhan kewajiban penyampaian laporan-laporan ke instansi terkait lainnya.

Untuk melihat Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai, dijelaskan bahwa DPPKB Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) Bidang, yaitu :

1. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan dan keuangan dan Kasubbag Tata Usaha yang tugasnya membantu Kepala Dinas dalam hal perencanaan program keuangan dan anggaran, dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi;

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi,



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

yang bertugas antara lain: menyusun dan melaksanakan rencana operasional kegiatan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan ;

3. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, dimana mempunyai tugas antara lain : merumuskan kebijakan program KB, motivasi serta pengendalian dan peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, rencana pendistribusian obat/ alat kontrasepsi, melaksanakan pelayanan KB terpadu, pelayanan dengan Mobil Unit Pelayanan, melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan rujukan;

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, mempunyai tugas antara lain : membina, melaksanakan, mengevaluasi dan mengurus operasional kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat seperti BKB, BKR, BKL dan IMP serta UPPKS, melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan bagi kelompok-kelompok tersebut dan juga mengadakan lomba-lomba.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya di jabat oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan SK langsung dari BKKBN Pusat dan digaji dari BKKBN Pusat juga.

2.2. Sumber Daya Dinas PPKB

Jumlah SDM pada Badan KB dan PP (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Binjai per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah SDM Badan KB dan PP Kota Binjai



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah SDM per 31 Desember 2016	79
2	Mutasi selama Tahun 2016	17
	Pensiun	0
	Mutasi Masuk	6
	Mutasi keluar	11
	Berhenti	0
	Meninggal	0
3	Jumlah SDM per 31 Desember 2016	79

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Table 2.2.2

Jumlah SDM berdasarkan Jabatan sejak Tahun 2017
(Setelah Perubahan Nomenklatur)

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	18
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	13
2	Pejabat Fungsional	32
3	Pelaksana / Staf	21
	Jumlah	71

Tabel 2.2.3

Jumlah SDM berdasarkan Strata Pendidikan sejak Thn 2017

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S – 3	0
2	S – 2	5
3	S – 1	33
4	Diploma I/ III/ IV	14
5	SLTA	18
6	SLTP	1
7	SD	0
	Jumlah	71



Tabel. 2.2.4

Jumlah SDM berdasarkan Golongan (2017)

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	19
2	Golongan III	45
3	Golongan II	7
4	Golongan I	0
5	Tenaga Honorer	15
Jumlah		86

Untuk tenaga Fungsional Dinas PPKB dibantu oleh 32 orang Petugas Lapangan (PLKB) yang PNS dan 5 orang PLKB Non PNS di tiap-tiap kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ka.UPTD di masing-masing kecamatan . PLKB PNS dengan SK dari BKKBN Pusat dan PLKB Non PNS inilah yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB karena mereka yang langsung berhubungan kepada masyarakat, baik itu dalam memberikan pelayanan KB maupun memberikan penyuluhan tentang KB, sehingga Laju Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Untuk unit usaha yang dikelola oleh Dinas PP dan KB sampai saat ini ada UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dimana DPPKB memberikan bantuan berupa pembinaan dan juga modal dalam usaha peningkatan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS tersebut, sedangkan pembinaan-pembinaan untuk kesejahteraan keluarga yang lain dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok Tribina Percontohan yaitu : BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).

Khusus untuk pembinaan Remaja disekolah-sekolah dan di tiap Kelurahan dibentuklah PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja) dengan program Genre (Generasi Berencana), semua dibawah pembinaan DPPKB.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mempunyai sasaran/ target secara umum adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Untuk sasaran/target Renstra DPPKB adalah tercapainya jumlah penduduk yang seimbang dan terciptanya kesejahteraan bagi penduduk tersebut, hal ini dapat diukur pada kinerja DKBPP antara lain dalam hal:

1. Naiknya persentase CPR (Pemakaian Alat Kontrasepsi)



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

2. Turunnya TFR (Angka Kelahiran)
3. Turunnya persentase PUS Unmetneed (Pasangan Usia Subur yang tidak berKB tapi tidak ingin punya anak lagi)
4. Turunnya persentase Perkawinan wanita usia dibawah 20 thn
5. Turunnya Laju Pertambahan Penduduk (LPP)
6. Bertambahnya jumlah anggota PIK-R
7. Bertambahnya jumlah Kelompok Kegiatan (POKTAN) seperti : BKB, BKR, BKR dan Kelompok UPPKS
8. Tersedianya Buku Umpan Balik
9. Dsb

Mengenai Indikator Kinerja DPPKB ini dapat kita lihat pada tabel 2.3.1 dan 2.3.2 berikut ini :

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja DPPKB Kota Binjai

No	Indikator Kinerja	Target IKU 2017	Target DPPKB Tahun k			
			REALISASI 2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	1 perda/ perwa	1 perda/ perwa	1 perda/ perwa	1 perda/ perwa	
2	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	34 Faskes	34 Faskes	38 Faskes	38 Faskes	
3	Persentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	6500 psrta	7000 psrta	7432 psrta	7500 psrta	



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

4	Persentase CPR	74,00%	74,00%	74,20%	74,60%
5	Persentase TFR	2,21%	2,21%	2,21%	2,15%
6	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	74,00%	40%	40%	40%
7	Persentase PUS Unmetneed	12,00%	12,11%	11,20%	10,10%
8	PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	600 org	634 org	510 org	479 org
9	Persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi	25,00%	22,50%	23,27%	20,00%
10	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
11	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	20	21	21	21
12	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	55,30%	63,40%	51,00%	47,90%
13	Cakupan jumlah Remaja yang Ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	60 klpk	66 klpk	66 klpk	66 klpk
14	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
15	Cakupan Jumlah Anggota Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)	4000 org	4250 org	4760 org	5000 org
16	Cakupan Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	300 klpk	296 klpk	319 klpk	400 klpk

No	Indikator Kinerja	Target IKU 2017	Target DPPKB Tahun		
			REALISASI 2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	PPKS di setiap Kecamatan	1 klpk	1 klpk	1 klpk	1 klpk
18	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia) yang ber- KB	1600 org	1700 org	1728 org	2000 org
19	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	300 PUS	296 PUS	319 PUS	400 PUS
20	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

21	Data Keluarga	600 buku/thn	600 buku/thn	600 buku/thn	600 buku/thn
22	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	5 OPD	5 OPD	8 OPD	8 OPD

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja DPPKB Kota Binjai (PAGU)

No	Indikator Kinerja	Target IKU 2017	Target DPPKB Tahun k			
			REALISASI 2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	100.000.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	
2	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	34.000.000	34 Faskes	38 Faskes	38 Faskes	
3	Persentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	25.000.000	25.000.000	40.000.000	50.000.000	
4	Persentase CPR	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	
5	Persentase TFR	40.000.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	
6	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	
7	Persentase PUS Unmetneed	40.000.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	
8	PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	600 org	634 org	510 org	479 org	
9	Persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	
10	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	20.000.000	20.000.000	25.500.000	35.500.000	
11	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	20.000.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000	
12	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

13	Cakupan jumlah Remaja yang Ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	100.000.000	100.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
14	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	25.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
15	Cakupan Jumlah Anggota Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)	80.000.000	80.000.000	120.000.000	120.000.000	150.000.000
16	Cakupan Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	35.000.000	35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000

No	Indikator Kinerja	Target IKU 2017	Target DPPKB Tahun		
			REALISASI 2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	PPKS di setiap Kecamatan	1 klpk	1 klpk	1 klpk	1 klpk
18	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia) yang ber- KB	1600 org	1700 org	1728 org	2000 org
19	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	300 PUS	296 PUS	319 PUS	400 PUS
20	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
21	Data Keluarga	600 buku/thn	600 buku/thn	600 buku/thn	600 buku/thn
22	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	5 OPD	5 OPD	8 OPD	8 OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKB

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat dan menjadi program unggulan untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah :

1. Program Keluarga Berencana
 1. Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan Obat Side Effect
 2. Pengelolaan Data dan Informasi
 3. Penyuluhan/ Sosialisasi mengenai Program Keluarga Berencana



4. Pemasangan Alat kontrasepsi
5. Pengembangan Kampung KB

Yang menjadi tantangan pada program ini adalah masih kurang lancarnya pendistribusian alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi, masih belum lengkapnya data dan informasi tentang kependudukan dan Program KB.

2. Program Kesehatan Reproduksi

1. Pembinaan PIK-R
2. Sosialisasi Program Genre

Yang menjadi hambatan mengenai program ini antara lain, masih sedikitnya jumlah anggota PIK-R sehingga informasi bagi remaja tentang program KB dan Genre kepada remaja masih kurang.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Pelayanan KB dengan MUYAN (Mobil Pelayanan KB)
2. Sosialisasi Vasektomi (MOP) dan Tubektomi (MOW)
3. Pelayanan KB di seluruh Faskes yang ada dikota Binjai

Yang menjadi hambatan pada program ini antara lain sedikitnya biaya operasional bagi kader-kader pencari akseptor sehingga pencapaian target kurang maksimal.

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB yang Mandiri

1. Lomba KB Lestari
2. Lomba Keluarga Harmonis
3. PKK KB Kesehatan
4. Operasional semua kelompok binaan (BKB, BKR dan BKL)
5. Pembinaan kampung KB

Hambatan pada program ini adalah kurangnya pendanaan/ biaya operasional untuk pembinaan dan pengembangan kelompok binaan yang menjadi percontohan dimasyarakat sehingga kelompok binaan tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik, serta masih baru berdirinya kampung KB di kota Binjai, jadi masih perlu banyak dukungan dari semua instansi terkait.

5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Lomba-lomba bagi kelompok binaan
2. Orientasi kelompok binaan

Hambatan pada program ini adalah kurangnya koordinasi antara DPPKB dengan instansi terkait atau LSM yang membawahi kelompok- kelompok binaan, sehingga kurang optimal hasil yang ingin dicapai.



6. Program Pengendalian Penduduk
 1. Tersedianya Grand Design Kependudukan
 2. Tersedianya Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk
 3. Tersedianya Data Keluarga, Buku Data Basis dan Buku Umpan Balik Pencapaian PB dan PA

Program ini merupakan program baru yang dimasukkan kedalam Revisi Renstra Tahun 2018 ini , karena Program ini merupakan Prioritas Nasional di bidang KB .

Hambatan pada program ini adalah belum adanya pengalaman dalam penyusunan Grand Design dan Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Pendudukan sehingga masih perlu banyak masukan.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PPKB

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai program-program Unggulan pada DPPKB terdapat permasalahan-permasalahan juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tersebut yang kemudian menjadi isu-isu strategi yang harus segera dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan semua program unggulan dapat terrealisasi secara maksimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKB yang intinya adalah pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pengarahan, pembinaan dan penyediaan fasilitas guna pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas ada beberapa masalah yang dihadapi yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Masalah kuantitas dan kualitas penduduk khususnya mengenai kesehatan maupun kesejahteraan, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan;
2. Tentang perlu adanya penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan, karena masih banyak yang belum sinkron antara satu dengan yang lainnya.

3.2 Telaah Visi. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih



Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kota Binjai adalah “ **Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera** “

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*Stake Holder*) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi Kota Binjai adalah :

1. Mewujudkan pemerintah yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efisien, demokratis dan terpercaya;
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (Smart People) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (Smart Mobility) melalui kualitas infra struktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) berkelanjutan dan pengembangan SDM (Sumber Daya manusia) yang terampil, inovatif, kreatif, produktif (Smart Economy & Smart Environment);
5. Meningkatkan kualitas standard hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan,keadilan dan kenyamanan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dapat dilihat sasaran jangka menengah Renstra K/L BKKBN Pusat adalah :



SASARAN RPJMN 2015 – 2019 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB(1)



No	Indikator	Baseline (2014)	2017	2018	2019
1. Pelayanan KB					
a.	Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi (Per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun)	2,6 (SDKI 2012)	2,33	2,31	2,28
b.	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all method) (Persen)	61,9% (SDKI 2012)	65,6	65,8	66
	(1) Tingkat putus pakai kontrasepsi (Persen)	27,1% (SDKI 2012)	25,3	25,0	24,6
	(2) persentase Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (Persen)	18,3% (modern method) 10,6% (all method) (SDKI 2012)	21,7	22,3	23,5
c.	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) (Persen)	11,4% (formula baru) (SDKI 2012)	10,26	10,14	9,91
2. Advokasi dan KIE					
a.	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	11 (Survei RPJMN 2013, BKKBN)	31	50	70
b.	Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan (persen)	34 (Survei RPJMN 2013, BKKBN)	46	48	50

12

SASARAN RPJMN 2015 – 2019 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB (2)



No	Indikator	Baseline (2014)	2017	2018	2019
3. Pembinaan Remaja					
a.	Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48 (SDKI 2012)	42	40	38
b.	Median usia kawin pertama perempuan (Tahun)	20,1 (SDKI 2012)	21	21	21
4. Pembangunan Keluarga					
a.	Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga (Persen)	5% (Survei RPJMN 2013, BKKBN)	30	40	50
5. Regulasi, Kolaborasi, serta Data dan Informasi					
a.	Mengatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah	Benang nomenklatur dan kapasitas	Tertentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap	Tertentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap	Tertentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap
b.	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya	1. UU 52/2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. PP 87/2014 ttg perkembangan kependudukan, PK, KB dan Sistem Informasi Keluarga	Penetapan pondungan terkait dengan perkembangan program	Penetapan pondungan terkait dengan perkembangan program	Penetapan pondungan terkait dengan perkembangan program
c.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	Registrasi Penduduk, Sensus, Survei, Proyeksi, Data Sektor dan kajian tentang KKB	Tersedianya dan pemanfaatannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan pemanfaatannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan pemanfaatannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

13

PROYEK PRIORITAS PROGRAM KB YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 2019



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK K/L
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
			Pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokasi di faskes
			Penyiapan Perencanaan kehidupan keluarga bagi remaja
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi berbasis Komunitas
			Peningkatan Pendidikan Gizi
			Peningkatan Promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan

16



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

Untuk BKKBN Provinsi dengan Visi “ **Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas** “

Mempunya Misi :

1. Pengarus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Dengan Sasaran **Strategis** Jangka menengah sesuai dengan usulan dalam RPJMD 2018-2023 :

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	LOKASI / SUMBER DATA
		2015	2016	2017	2018	2019		
								BKKBN
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.60	2.37	2.36	2.33	2.31	2.28	2.28	SDKI
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57.9	60.5	60.7	60.9	61.1	61.3	61.3	SDKI
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11.4 (6,6)	10.60	10.48	10.26	10,14	9,91	9,91	SDKI
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18.3	20.50	21.19	21.70	22.30	23.50	23.50	SDKI
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27.1	26.0	25.7	25.3	25.0	24.6	24.6	SDKI



**SASARAN STRATEGIS (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(USULAN DALAM RPJMD 2018-2023)**

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL (TAHUN 2017)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,91	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	48,3	53	55	58	60	62
3	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	-	21,84	21,87	21,91	21,94	21,98

No	Sasaran Strategis	Kondisi Awal	Kondisi Thn				
----	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

		(2017)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,91	2,79	2,76	2,73	2,71	2,6
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	48,3	53	55	58	60	

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja DPPKB Kota Binjai

No	Indikator Kinerja	Target IKU 2017	Target DPPKB Tahun k			
			REALISASI 2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	1 perda/ perwa	1 perda/ perwa	1 perda/ perwa	1 perda/ perwa	
2	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	34 Faskes	34 Faskes	38 Faskes	38 Faskes	
3	Persentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	6500 psrta	7000 psrta	7432 psrta	7500 psrta	
4	Persentase CPR	74,00%	74,00%	74,20%	74,60%	
5	Persentase TFR	2,21%	2,21%	2,21%	2,15%	
6	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	74,00%	40%	40%	40%	
7	Persentase PUS Unmetneed	12,00%	12,11%	11,20%	10,10%	
8	PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	600 org	634 org	510 org	479 org	
9	Persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi	25,00%	22,50%	23,27%	20,00%	
10	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	
11	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	20	21	21	21	
12	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	55,30%	63,40%	51,00%	47,90%	



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

13	Cakupan jumlah Remaja yang Ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	60 klpk	66 klpk	66 klpk	66 klpk
14	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
15	Cakupan Jumlah Anggota Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)	4000 org	4250 org	4760 org	5000 org
16	Cakupan Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	300 klpk	296 klpk	319 klpk	400 klpk

Sedangkan untuk Sasaran jangka Menengah DPPKB Kota Binjai adalah :

No	Sasaran Strategis	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Thn 2017	Kondisi Thn 2018	Kondisi Thn 2019	Kondisi Thn 2020	Kondisi Thn 2021
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	221
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	48,3	53	55	58	60	78
3	Usia Kawin Pertama bagi wanita	20	21	21	21	21	21

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Faktor pendorong Capaian Kinerja DPPKB jika dilihat dari Sasaran Jangka menengah BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi adalah :

1. Sudah tercapainya target untuk kota Binjai untuk pencapaian kenaikan persentase CPR
2. Sudah tercapainya target untuk kota Binjai untuk pnurunan persentase TFR
3. Sudah tercapainya target usia kawin pertama bagi wanita di Kota Binjai yang rata-rata usia 21 thn



Dalam hal ini tidak ada faktor Penghambat jika dihubungkan dengan sasaran jangka Menengah K/L maupun dengan Provinsi, dan dianggap Kota Binjai telah berhasil dalam program KKBPK.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada pada RPJMD Kota Binjai 2016-2021 masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan masalah yang sangat mempengaruhi rencana dan kajian tersebut, yang mana bila pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan maka banyak permasalahan yang timbul antara lain masalah hunian yang padat, perekonomian yang tidak berkembang /kurang nya kesejahteraan penduduk sehingga rencana tata ruang wilayah akan sangat sulit untuk dilaksanakan dengan baik .

Lalu masalah kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak akibat kelahiran yang tidak terencana menjadikan kajian lingkungan hidup yang tidak baik/ tidak sesuai seperti yang diharapkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari semua pernyataan diatas Program Keluarga Berencana sebagai ujung tombak keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Binjai, secara riil dilapangan juga mempunyai isu-isu strategis yaitu antara lain :

1. Angka pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun;
2. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun;
3. Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 thn;
4. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP);
5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
6. Cakupan Anggota BKB ber KB;
7. Cakupan Anggota BKR ber KB;
8. Cakupan Anggota BKL ber KB;
9. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dalam hal ini pembinaan Calon Pengantin (CATIN);
10. Cakupan Remaja dalam PIK-R;



11. Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian Penduduk.

Sedangkan isu-isu strategis bidang-bidang lain yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyediaan Data dan Informasi Program KB;
2. Dampak tentang adanya Bantuan DAK FISIK/ Non FISIK dalam Program KKBP di Kota Binjai;
3. Peningkatan Pembinaan Tribuna Percontohan dan Institusi masyarakat;
4. Peningkatan sarana dan prasarana kerja bagi PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dilapangan;
5. Pembinaan Kampung KB dan menambah kampung KB agar bisa ada di tiap kecamatan;

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan semua permasalahan dan pengembangan SKPD.



Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB antara lain :

1. Mewujudkan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan, dengan kualitas standard hidup dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, guna tercapainya target pencapaian maksimal demi keberhasilan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan dengan program KB Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data dan Informasi Program KB;
3. Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Generasi Berencana (GenRe) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kampung KB;
4. Meningkatkan pembinaan Keluarga di masyarakat demi terwujudnya Keluarga Sejahtera Bahagia;

Sasaran merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun yang menjadi **Sasaran** Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

1. Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap bidang pembangunan lainnya, khususnya untuk kota Binjai. Sarana dan prasarana yang memadai untuk terlaksananya program KB terutama untuk peningkatan jumlah akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi jangka panjang);
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana Meningkatkan mutu pelayanan dalam program KB;
3. Meningkatnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang memahami tentang Alat Kontrasepsi Modern Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;
4. Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi;
5. Turunnya Angka Kelahiran Total;
6. Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru Buku umpan Balik tentang data PA dan PB serta persentase pemakaian selama 1 tahun;



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

7. Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB;
8. Menurunnya PUS yang istrinya di bawah 20 thn Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kampung KB;
9. Menurunnya Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi;
10. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk;
11. Terlaksananya Pembinaan dan Konseling bagi Remaja;
12. Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19;
13. Meningkatnya jumlah kelompok PIK-R;
14. Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sejahtera oleh Kader pada kelompok Kegiatan (POKTAN);
15. Meningkatnya jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL;
16. Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS;
17. Tersedianya PPKS (Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan;
18. Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB;
19. Meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang berKB;
20. Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);
21. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan;
22. Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB

Pada tabel 4.2 dibawah ini dapat kita lihat tujuan dan sasaran jangka menengah



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

Hubungan antara tujuan dan sasaran DPPKB pada Renstra ini dengan tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai dapat dilihat dari kesamaan dalam hal tujuan akhir untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Binjai, hal ini dapat dilihat pada tujuan RPJMD yang sesuai dengan Tujuan Renstra yaitu :

Sedangkan untuk sasaran dapat dilihat hubungannya yaitu pada sasaran RPJMD

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi merupakan dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas guna mewujudkan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah strategi dan kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan dengan efektif dan efisien dengan berpedoman kepada RPJMD.



Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DPPKB adalah strategi strategi dan kebijakan DPPKB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPPKB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DPPKB bagi setiap program prioritas.

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD yang telah disesuaikan dengan RPJMD

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 5.2



B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana semua program di tiap SKPD sudah ditetapkan dalam suatu system yang disebut SIMDA yang mana isinya sesuai dengan RPJMD.

Program dari Dinas PPKB yang ada antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Keluarga Berencana;
7. Program Kesehatan Reproduksi;
8. Program Pelayanan Kontrasepsi;
9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri;
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Setelah keluarnya Tupoksi baru Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, dan dengan melakukan telaah pada program Kementerian dan Lembaga serta Provinsi, maka ditambahkan lagi satu



program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk yang menjadi program ke 11. Yaitu:

11. Program Pengendalian Penduduk

Diharapkan dengan program baru ini nanti dapat lebih memaksimalkan kinerja DPPKB kedepannya.

Program pada DPPKB merupakan program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB. Rencana Program Prioritas beserta indikator kinerja program dan Pagu DPPKB dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan Dinas PPKB ke dalam Rencana Kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan Kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPPKB. Indikator Kinerja Program Prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

6.2 Langkah- langkah Perumusan Rencana Program dan Kegiatan

Langkah-langkah yang harus diambil untuk merumuskan Rencana Program dan Kegiatan antara lain :

- a. Menyesuaikan indikator program dan pagu Anggaran untuk 1 Tahun;
- b. Merumuskan target outcome program untuk mencapai sasaran pembangunan;
- c. Melakukan perumusan target output (keluaran) yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program Dinas PPKB;
- d. Merumuskan kegiatan dengan menghitung biaya kegiatan dan total biaya per program;
- e. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan, lalu kemudian disusunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.



B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai Dinas PPKB dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat pula diartikan sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam program/kegiatan yang direncanakan.

Adapun tujuan indikator kinerja adalah :

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsesus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 2016-2021

3. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/ unit kerja masing—masing.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai harus mengacu pada sasaran RPJMD yang juga berpedoman pada visi dan misi RPJMD tersebut.

Sesuai dengan misi ketiga yaitu : “ Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbangsa, bernegara, religius dan berdaya saing”

Juga pada tujuan kedua yaitu : “ Mewujudkan masyarakat yang sehat”

Dari Misi dan tujuan tersebut diatas dapat dilihat sarasannya adalah :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Meningkatnya program KB pada kampung KB

Dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sesuai dengan Sasaran RPJMD tersebut diatas, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Dinas PPKB Kota Binjai. Kinerja Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.2

7.2 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk dapat melihat keterkaitan antara Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Misi dan Tujuan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini :



RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021

B A B VIII
P E N U T U P

8.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa RENSTRA (Rencana Strategik) Tahun 2016 -2021 Revisi tahun 2018 yang berpedoman pada RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021 ini merupakan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai sebagai pedoman/ dasar pelaksanaan semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tata laksana yang berlaku untuk membantu mewujudkan visi misi Kepala Daerah / Walikota terpilih.

8.2 Saran

Agar semua Program/kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai yang telah direncanakan untuk 5 (lima)Tahun kedepan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dengan capaian target yang memuaskan, maka diharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik dari segi Pembinaan maupun dari segi pendanaan , sehingga diperoleh keberhasilan pelaksanaan Program/ kegiatan mencapai 100% atau minimal diatas 50 %, pembangunan Kota Binjai akan lebih maju lagi dimasa yang akan datang.



Smoga segala kendala yang akan menghambat nantinya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan didapatkan hasil pencapaian maksimal dalam masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Binjai, Februari 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI**



Drg. LILIK ROSDEWATI, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630725 198902 2 001

